

**PENGARUH PENERAPAN METODE *E-VOTING* TERHADAP TINGKAT  
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI DESA WONODADI KECAMATAN GADINGREJO**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FADILLAH MEIKA PUTRI**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**BANDAR LAMPUNG**

**2023**

## ABSTRAK

### PENGARUH PENERAPAN METODE *E-VOTING* TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WONODADI KECAMATAN GADINGREJO

Oleh

**Fadillah Meika Putri**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat desa wonodadi untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya. Pada tahun 2022, Desa Wonodadi mengadakan pemilihan umum dengan menggunakan e-voting yang sebelumnya masih konvensional (berdasarkan surat suara). Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan metode *e-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat desa pada pemilihan kepala desa di desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian yaitu metode kuantitatif. Subjek pada penelitian sebanyak 93 responden masyarakat desa wonodadi. Teknik penghitungan data menggunakan bantuan SPSS versi 20.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi sederhana yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh thitung untuk variabel Pengaruh Penerapan Metode *E-voting*(X) sebesar 8.174 dengan  $dk = 93 - 2 = 91$  pada  $\alpha 0,05$  sebesar 1,990. Jadi  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $8,174 > 1,990$ . Dengan demikian bahwa hipotesis  $H_0$  ditolak dan hipotesis  $H_1$  diterima. Hasil dari penelitian ini adanya Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi, dan persentase besarnya pengaruh positif dari Penerapan Metode *E-voting* terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi. adalah sebesar 42,3%.

**Kata Kunci** : Metode E-Voting, Partisipasi Masyarakat

## ABSTRACT

### PENGARUH PENERAPAN METODE *E-VOTING* TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WONODADI KECAMATAN GADINGREJO

Oleh

**Fadillah Meika Putri**

This research is motivated by the lack of awareness of the Wonodadi village community to participate in exercising their right to vote. In 2022, Wonodadi Village will hold general elections using e-voting which was previously conventional (based on ballots). The aim of this research was to determine the effect of the application of the e-voting method on the level of village community participation in village head elections in Wonodadi Village, Gadingrejo District. The research method used in this research is quantitative method. The subjects in the study were 93 respondents from the Wonodadi village community. The data calculation technique uses SPSS version 20.

Based on the calculation results of the simple regression analysis used in this study, the tcount for the variable Effect of Applying the E-voting Method (X) is 8,174 with  $dk = 93 - 2 = 91$  at  $\alpha 0.05$  of 1.990. So  $tcount > ttable$  or  $8.174 > 1.990$ . Thus that the hypothesis  $H_0$  is rejected and the hypothesis  $H_1$  is accepted. The results of this study are the influence of the application of the e-voting method on the level of community participation in village head elections in Wonodadi village, and the percentage of positive influence from the application of the e-voting method on the level of community participation in village head elections in Wonodadi village. was 42.3%.

**Keywords:** E-Voting Method, Community Participation

**PENGARUH PENERAPAN METODE *E-VOTING* TERHADAP TINGKAT  
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PADA PEMILIHAN KEPALA  
DESA DI DESA WONODADI KECAMATAN GADINGREJO**

**Oleh**

**FADILLAH MEIKA PUTRI**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA PENDIDIKAN**

**Pada**

**Program Studi Ppkn  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung**



**PROGRAMSTUDIPENDIDIKANPANCASILADANKEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2023**

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN METODE E-VOTING TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA WONODADI**

Nama Mahasiswa : **Fadillah Meika Putri**

NPM : **1813032014**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

**MENYETUJUI**

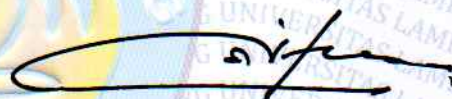
**1. Komisi Pembimbing**

Pembimbing I,



**Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19820727 200604 1 002

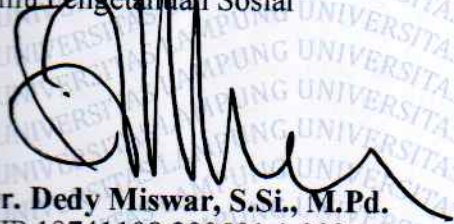
Pembimbing II,



**Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 231601840309101

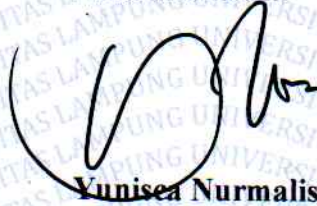
**2. Mengetahui**

Ketua Jurusan Pendidikan  
Ilmu Pengetahuan Sosial



**Dr. Dedy Miswar, S.Si., M.Pd.**  
NIP 19741108 200501 1 003

Ketua Program Studi  
Pendidikan PKn



**Yunisa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**  
NIP 19870602 200812 2 001

**MENGESAHKAN**

I. Tim Penguji

Ketua

**: Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**



Sekretaris

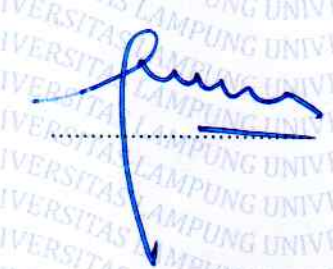
**: Edi Siswanto, S.Pd., M.Pd.**



Penguji

Bukan Pembimbing

**: Drs. Berchah Pitoewas, M.H.**



Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Prof. Dr. Sunyono, M.Si.**

NIP 19651230 199111 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **10 Oktober 2023**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, adalah:

Nama : Fadillah Meika Putri  
NPM : 1813032014  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Alamat : Jl. Masjid Agung no. 65, RT 01 RW 01 Wonodadi,  
gadingrejo, Kab. Pringsewu

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 17 Februari 2024



Fadillah Meika Putri

NPM 1813032014

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya, pada tanggal 02 Mei 2000.

Anak kedua dari empat bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Komarudin dan Ibu Ponirah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2012, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Gadongrejo pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur undangan atau yang biasanya dikenal dengan SNMPTN. Penulis melaksanakan Kunjungan Kerja Ilmiah (KKI) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta Tahun 2020 dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tegalsari kecamatan Gadingrejo serta melaksanakan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) di SMP N 1 Gadingrejo.



## MOTTO

**“Jangan pernah merasa kamu tidak punya harapan, percayalah setiap masalah selalu ada jalan dan Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak berhenti berusaha”**

**(Fadillah Meika Putri)**

## *PERSEMBAHAN*

*Dengan mengucap puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kupersembahkan karya ini sebagai bukti dan sayangnya saya kepada :*

*“Kedua orangtua ku yang tercinta, Bapak Komarudin dan Ibu Ponirah yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, selalu mendukungku disetiap langkahku dan tak pernah lupa menyertai ku di dalam sujudmu sehingga aku mampu melewati segala rintangan dalam menyelesaikan deretan tulisan yang penuh perjuangan ini karna kalian yang selalu mendorongku, memotivasiku dan menguatkan ku”.*

*Serta*

*Almamaterku Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Puji Syukur Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Metode E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran, motivasi dan bantuan baik moral maupun spiritualserta arahan dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Plt. Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
3. Bapak Riswandi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Bapak Albert Maydiantoro, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
5. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaandan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, dan Pembimbing 1 Saya terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sertamotivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
7. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd, selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
8. Bapak Edi Siswanto, S.Pd, M.Pd., selaku pembimbing II, terimakasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memotivasi, memberikan tenaga dan pikiran serta nasehat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., Selaku Pembahas I, terimakasih telah bersedia memberikan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd., M.Pd., selaku Pembahas II terima kasih telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta motivasi, dan nasehat dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Progran Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, motivasi, serta segala bantuan yang diberikan;
12. Staf Program Studi PPKn Universitas Lampung yang telah membantupenulis selama mengadakan penelitian;
13. Bapak kepala pekon Wonodadi beserta jajarannya yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti dilokasi serta membantu penulis dalam penelitian;
14. Kepada diriku sendiri, terimakasih sudah bertahan dengan segala rintangan dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, terimakasih tetap berjuang walau jalan yang dilalui tidak semudah yang direncanakan.

15. Teristimewa untuk keluargaku tersayang, Ibu Ponirah terimakasih mama selalu mendoakan ku dan memberikan ku kasih sayang yang tiada terkira dan selalu mendukungku serta selalu menjaga kesehatanku, Bapak Komarudin terimakasih atas kerja keras mu dalam memberikan nafkah kepada keluarga sehingga aku mampu menyelesaikan pendidikan ini dan tak luput doa dari papa, terimakasih kepada kakakku tercinta Fajar Khoirul Abdillah yang telah memberikan dukungann mendengarkan keluh kesah ku dan motivasi untukku, selalu ada disetiap aku mulai merasa jatuh dan memenuhi keinginanmu untuk kebahagiaanku serta menjadi kakak yang terbaik disetiap aku susah maupun senang, serta Adik tersayang Fahira Anisa Rimadhina terimakasih sudah selalu menjadi teman curhat tete disaat tete sedang sedih serta selalu menjadi partner pekerjaan rumah yang baik, dan Faiz Ahmad Nouval terimakasih telah menjadi adik yang baik yang berbakti kepada orang tua dan kakak-kakaknya ,Terimakasih atas Doa, ketulusan, keikhlasan, kasih sayang dan kesabaran yang dicurahkan untukku, terimakasih telah menjadi keluargaku yang sempurna, terimakasih sudah merawat dan mendidikku menjadi seseorang yang insyaallah bermanfaat, terimakasih atas semua yang mama, papa, aak, dan adik berikan kepadaku dengan penuh ketulusan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan nikmat sehat dan senantiasa menjaga mama, papa, aak, adik dengan rahmat, keimanan dan ketaqwaan;
16. Teruntuk Sahabatku Zaqia Fasbiq Tasmara dan Nafazri Eprilia terimakasih telah menemaniku selama 11 tahun ini yang tidak pernah lelah memberikan ku semangat, tenaga, waktu dan pikiran dalam menemaniku menghadapi kehidupanku dari soal kehidupan sampai percintaanku, yang selalu sabar menghadapi keluh kesahku yang tidak pernah lelah menemaniku kemanapun aku ingin pergi, selalu menjadi orang paling depan ketika aku disakiti oleh orang dan selalu cerewet untuk menyelesaikan skripsi ini demi kebaikanmu.

17. Terimakasih untuk sahabat-sahabat ku Marcelina Anggraini, Bagas Habibulloh, Dinda Ditya Pratiwi, Willy Andreas, dan Ardelia Putri Ramdhani yang telah memberikan aku semangat dan membantu ku dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu setia mendengarkan keluh kesah ku dan memberikan aku masukan.
18. Terimakasih untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Filda Octovanny, Raras Agestia Putri, Annisa Balinda Luhtitisari, Zenia Elga, dan Sovia Gusviranti yang telah bersamaku dari awal perkuliahan hingga menyelesaikan perkuliahan, selalu membantu ku disaat aku kesulitan baik dalam kehidupan maupun perkuliahan, slalu menjadi pengingat disaat aku dijalan yang salah, slalu memberikan motivasi yang baik untuk perkuliahan ku dan kehidupanku dan tak pernah lelah menjadi tempat mengeluhku disaat aku terpuruk.
19. Terimakasih untuk saudara persepupuan ku Ayu Triwantika dan Devi Nurjanah yang selalu saling mengingatkan dan memberi semangat untuk tetap berjuang menyelesaikan skripsi ini bersama-sama dan selalu menjadi tempat ku bersandar ketika aku lelah ketika harus pulang pergi ke kampus dengan waktu kurang lebih satu jam, dan menjadi saudara sepupu yang solidaritas dan luar biasa.
20. Terimakasih kepada teman-teman seperjuanganku, Aldi Prayoga, Ade Ihza Kurniawan, Ade Arif Abdillah, yang selalu membantu ku dalam menyelesaikan skripsi ini, yang selalu menemaniku sampai aku selesai bimbingan, dan slalu memberikan aku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih kepada Maulana Sa'adi yang selalu menemaniku, mendengarkan keluh kesahku, selalu mendukungku, selalu menyemangati ketika aku sedang terpuruk dan memberikanku nasihat dan jalan terbaik serta selalu menjadi sumber kebahagiaan
21. Terimakasih kepada Bapak Joko Asmoro selaku penjaga gedung yang telah menyiapkan gedung saat penulis melaksanakan seminar.
22. Teman-teman program studi PPKn Angkatan 2018 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih untuk kebersamaannya

selama ini. Kita disatukan oleh pendidikan dan dipisahkan oleh masa depan. Semoga apa yang kita cari selama ini bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah SWT;

23. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023  
Penulis

**Fadillah Meika Putri**  
**NPM. 1813032014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode E-Voting Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis. Penulis menyadari bahwa proposalskripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga Allah selalu memberkahi langkah kita dan memberikan kesuksesan dimasa mendatang dan semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis,

**Fadillah Meika Putri**  
**NPM. 1813032014**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>COVER</b> .....	<b>iv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SAWACANA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	9
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
A. Manfaat Teoritis.....	10
B. Manfaat Praktis.....	10
1.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	11
A. Ruang Lingkup Ilmu.....	11
B. Ruang Lingkup Objek Penelitian.....	11
C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian.....	11
D. Wilayah Penelitian.....	12
E. Waktu Penelitian.....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Deskripsi Teoritis.....	13
A. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik.....	13
1. Pengertian Partisipasi Politik.....	13
2. Model Dan Bentuk Partisipasi Politik.....	17
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik.....	21
4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi.....	24

B.	Tinjauan Umum Tentang Masyarakat.....	26
1.	Pengertian Masyarakat.....	26
2.	Kedudukan Masyarakat Dalam Demokrasi.....	27
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>E-voting</i> .....	29
1.	Pengertian Elektronik Voting.....	29
2.	Manfaat <i>E-voting</i> .....	29
3.	Tujuan <i>E-voting</i> .....	30
4.	Metode <i>E-voting</i> .....	30
5.	Prinsip-Prinsip Dalam Metode <i>E-voting</i> .....	31
6.	Kelebihan Metode <i>E-voting</i> .....	33
7.	Kekurangan Metode <i>E-voting</i> .....	34
D.	Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa.....	35
1.	Pemilihan Kepala Desa.....	35
2.	Syarat-Syarat Menjadi Calon Kepala Desa.....	36
3.	Asas-Asas Dalam Pemilihan.....	37
4.	Syarat-Syarat Menjadi Pemilih.....	38
2.2	Kajian Yang Relevan.....	40
2.3	Kerangka Pikir.....	43
2.4	Hipotesis.....	45
<b>III.</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>46</b>
3.1	Metode Penelitian.....	46
3.2	Populasi Dan Sampel.....	46
A.	Populasi.....	46
B.	Sampel.....	47
3.3	Variabel Penelitian.....	48
A.	Variabel Independen (Bebas).....	48
B.	Variabel Dependen (Terikat).....	49
3.4	Definisi Konseptual Dan Definisi Operasional Variabel.....	49
A.	Definisi Konseptual.....	49
1.	Penerapan Metode <i>E-voting</i> .....	49
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	49
B.	Definisi Operasional.....	50
1.	Penerapan Metode <i>E-voting</i> .....	50
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	51
3.5	Rencana Pengukuran Variabel.....	52
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	53
A.	Teknik Angket.....	53
B.	Teknik Penunjang.....	53
3.7	Uji Validitas Dan Uji Reliabelitas.....	53

A. Uji Validitas.....	53
B. Uji Relibitas.....	55
3.8 Teknik Analisis Data.....	58
A. Teknik Distribusi Frekuensi.....	58
B. Uji Prasyarat Analisis.....	58
1. Uji Normalitas.....	58
2. Uji Linear.....	58
3. Uji Homogenitas.....	59
C. Uji Hipotesis.....	59
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Langkah langkah penelitian.....	50
A. Persiapan Pengajuan Judul.....	50
B. Penelitian Pendahuluan.....	50
C. Pengajuan Rencana.....	51
D. Penyusunan Alat Dan Pengumpulan Data.....	51
E. Pelaksanaan Uji Coba Penelitian.....	52
1....Uji Validitas.....	52
2....Uji realibitas.....	54
4.2 Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian.....	57
4.3.Deskripsi Data Penelitian.....	58
A...Pengumpulan Data.....	58
B...Penyajian Data.....	58
1....Penyajian Data Penerapan Metode	
<i>E-voting</i> (variabel X).....	59
2.. Penyajian data Tingkat Partisipasi	
Masyarakat (Variabel Y).....	66
4.4 Analisis Data Penerapan Metode <i>E-voting</i> (Variabel X)	
Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan	
Kepala Desa (Variabel Y).....	71
A. Uji Prasyarat.....	71
1. Uji Normalitas.....	71
2. Uji Linieritas.....	72
B. Uji Analisis Data.....	73
1. Uji Regresi Linear Sederhana.....	73
C. Uji Hipotesis.....	75
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian.....	77
A. Penerapan Metode E-voting (Variabel X).....	78

1. Indikator Sosialisasi (Variabel X).....	78
2. Indikator Teknologi ( Variabel X).....	80
3. Indikator Sosial Ekonomi (Variabel X).....	80
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa (Variabel Y).....	82
1. Indikator Hukum (Variabel Y).....	82
2. Indikator Operasional Prosedural (Variabel Y).....	83
C. Pengaruh Penerapan Metode <i>E-voting</i> (Variabel X) Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa (Variabel Y).....	84
4.6 Keterbatasan Peneliti.....	88
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	90

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu .....</i>	40
Tabel 3. 1 Jumlah Pemilih Tetap .....	46
Tabel 3. 2 Indeks Koefisien Reliabilitas .....	55
<i>Tabel 4. 1 Hasil Uji Validitas angket (Variable X) Kepada 20 Responden .....</i>	53
<i>Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas angket (Variable Y) Kepada Sepuluh Responden ....</i>	54
<i>Tabel 4. 3 Uji Reliabilitas (Variabel X) Kepada 20 .....</i>	55
<i>Tabel 4. 4 Uji Reliabilitas (Variabel Y) Kepada 20 .....</i>	56
<i>Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Indikator Sosialisasi penggunaan E-voting .....</i>	60
<i>Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Indikator Teknologi .....</i>	61
<i>Tabel 4. 7 Distribusi Frekuensi Indikator Sosial Ekonomi .....</i>	63
<i>Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Akumulasi Penerapan Metode E-voting .....</i>	65
<i>Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Indikator Hukum .....</i>	67
<i>Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Indikator Prosedural Operasional .....</i>	69
<i>Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Akumulasi Tingkat Partisipasi Masyarakat .....</i>	71
<i>Tabel 4. 12 Data Hasil Uji Normalitas Penelitian .....</i>	72
<i>Tabel 4. 13 Data Hasil Uji Linieritas Penelitian .....</i>	72
<i>Tabel 4. 14 Regresi Linier Sederhana .....</i>	73
<i>Tabel 4. 15 Hasil Perhitungan R Kuadrat Menggunakan SPSS 20 .....</i>	75

## DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 2. 1 Kerangka Pikir</i> .....	45
---	----

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam politik menunjukkan bahwa demokrasi semakin tampak di Indonesia. Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokrasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena didalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala desa dilakukan pemilihan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam proses tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, mengemukakan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan bahwa yang mengatur dan mengurus pemerintah daerah itu sudah menjadi tanggungjawabnya para pemerintah daerah agar bisa mengatur dan mengurus sendiri oleh mereka, kesejahteraan masyarakat itu agar lebih mempercepat untuk terwujud maka harus diarahkan melalui pelayanan, pemerdayaan peningkatan dan partisipasi masyarakat, serta dengan peningkatan dalam daya saing di daerah itu harus memperhatikan juga prinsip berdemokrasi, keseimbangan, keadilan, kejayaan dan kekhususan dalam suatu daerah dengansistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan otonomi daerah ,hal ini yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerintah menghadirkan pemerintahan daerah, demi mewujudkan hal tersebut, maka Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi menjadi daerah kabupaten dan kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi, dan setiap daerah atau daerah wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa atau kelurahan. (Nurcholis 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan antara desa dan kelurahan, keduanya merupakan satuan pemerintahan terendah dengan status yang berbeda.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat dan pelaksanaan tugasnya. Sedangkan desa adalah satuan pemerintahan terendah yang diberikan sebagian urusan kewenangan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyelenggara desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Di bidang politik, karena otonomi adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis. (Yuningsih, Neneng Yani 2016)

Dalam penyelenggaraannya desa memerlukan suatu organisasi atau lembaga dan pemimpin atau kepala yang nantinya mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Menurut HAW Widjaja (2008), desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi asli yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri (Widjaja. HAW 2008). Desa memiliki pemerintahan sendiri yang disebut sebagai Pemerintahan Desa, yang mempunyai pengertian menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa, Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (PILKADES) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan. Pemilihan umum juga menunjukkan seberapa besar partisipasi politik masyarakat, terutama di negara berkembang. Kebanyakan negara ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil-tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Ikut sertanya masyarakat akan membantu penanganan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan-perbedaan etnis, budaya, status sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. (Budiardjo 2010)

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 25-26), bahwa kepala desa merupakan pemerintah desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam prosesnya, pemilihan kepala desa melalui tahap persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Calon kepala desa yang mempunyai perolehan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa disahkan menjadi kepala desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan kepala desa dalam bentuk keputusan bupati atau walikota.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, dalam konteks politik, desa mengurus kehidupan secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu sudah dimilikinya semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa desa disebut memiliki otonomi yang asli, yang berbeda dengan daerah otonom lainnya seperti kabupaten, karesidenan, dan provinsi yang memperoleh otonominya dari pemerintah nasional (Mashuri 2013).

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum menjadi salah satu wujud kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah memposisikan masyarakat sebagai warga Negara (pemilih) bukan sebagai politisi (yang dipilih). Di negara berkembang seperti Indonesia kegiatan partisipasi politik masih dianggap sebatas menggunakan hak suara dalam pemilihan umum untuk mendukung calon atau kandidat dalam pemilihan umum. Anggapan ini bersifat umum di masyarakat, apabila dikaitkan dengan pengertian partisipasi menurut para ahli politik tentunya ini merupakan hal yang sangat keliru, karena kegiatan partisipasi politik adalah ikut serta dalam pemilihan umum mulai dari memberikan hak suara, mengikuti kampanye baik legal atau illegal, terpaksa atau kehendak sendiri.

Dalam hal pemilihan kepala desa selama ini diselenggarakan dengan cara konvensional atau dengan cara mencoblos, namun seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan yang besar bagi manusia, termasuk cara untuk melaksanakan voting. Penggunaan teknologi komputer pada pelaksanaan voting ini dikenal dengan istilah *electronic voting (E-voting)*. *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik.

Pemilihan kepala desa dengan cara konvensional dianggap kurang efektif dan efisien, karena menghabiskan banyak waktu dan biaya. Meskipun begitu, pemilihan umum dengan cara konvensional mudah untuk dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa yang tidak semuanya paham tentang teknologi, sehingga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Berbeda

dengan pemilihan umum yang menggunakan sistem *E-voting* yang dianggap lebih efektif dan efisien serta akurat. Sistem pelaksanaannya *E-voting* akan terhubung langsung dengan alat-alat elektronik, dalam hal ini masyarakat secara tidak langsung dituntut untuk memahami langkah-langkah dalam pelaksanaan sistem *E-voting* terhadap kecanggihan perangkat elektronik. Metode pemungutan suara secara elektronik (*E-voting*) juga telah diperkenalkan menjadi salah satu metode pemungutan suara oleh MK sesuai dengan Amar putusan No. 147/PUU-VII/2009.

*E-voting* atau *Electronic voting* adalah proses pemilihan umum yang mengambil manfaat dari perangkat elektronik, di mana seluruh atau sebagian proses kegiatannya, dimulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, sampai penghitungan suara, dilaksanakan secara elektronik. Tujuan pemakaian *E-voting* bukan hanya untuk mempercepat proses kegiatan pemilihan umum saja, namun ada juga menjaga orisinalitas dari suara pemilih, kerahasiaan pemilih, dan juga menjaga keakuratan penghitungan suara (Dreher, I. M., Djanali, S., & Pratomo 2016). Pelaksanaan *E-voting* membutuhkan persiapan dan kesiapan yang matang baik dari perangkat desa maupun masyarakatnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya.

Pemilihan Kepala Desa pada dasarnya dianggap sebagai demokrasi yang paling nyata di desa. Masyarakat mendapatkan hak untuk memilih maupun menjadi kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa tidak terjadinya kompetisi dalam partai, jadi partisipasi masyarakat menjadi sangat berpengaruh. Selama ini pemilihan di desa Wonodadi menggunakan metode konvensional yaitu yang kita tahu menggunakan surat suara dan mencoblos salah satu calon yang kita pilih, seiring berjalannya waktu dan fakta yang terjadi di lapangan, selama ini pemilihan kepala desa dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan. Permasalahan tersebut ditimbulkan karena ulah aparat penyelenggaraan pemilihan, dan masyarakat sebagai pemilih. Dalam hal ini Radityo, (2013) mengatakan bahwa salah satu permasalahan yang ditimbulkan dalam pemilihan kepala desa dengan cara lama yaitu pemilih salah dalam memberi tanda pada kertas suara, karena ketentuan keabsahan

penandaan yang kurang jelas, sehingga banyak kartu suara yang dinyatakan tidak sah atau rusak. Permasalahan yang terjadi akan berimbas pada proses perhitungan suara. Di Indonesia sendiri penggunaan sistem *E-voting* telah dilaksanakan pada tahun 2009 di Kabupaten Jembara, Bali merupakan kabupaten pertama yang telah menggunakan sistem *E-voting* dalam pemilihan Kepala Dusun.

Penggunaan *E-voting* di kabupaten Jembrana telah menghemat anggaran lebih 60 persen, seperti anggaran untuk kertas suara. Pertama di Kalimantan, kabupaten Tabalong mencoba menerapkan pemilihan Kepala Desa dengan sistem *E-voting*, dari 57 Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Tabalong terdapat tiga Desa yang menerapkan sistem elektronik voting (*E-voting*), penerapan dilakukan di Desa Kambitin Raya, Desa Kasiau dan di Desa Tanta. Hal ini merupakan upaya pemerintah Tabalong untuk menerapkan sistem pemilihan kepala desa yang berbasis elektronik dan bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala desa karena semuanya terpantau oleh sistem elektronik. (Gusti Ilham Husada, Dr. Hj. Budi Setiawati 2021).

Pada tahun 2022 Desa Wonodadi membuat perancangan baru yaitu pemilihan kepala desa menggunakan metode *E-voting*. Pemungutan suara *E-voting* dijalankan menggunakan teknologi dengan melalui perangkat elektronik sebagai media, media elektronik selalu menjadi hambatan bagi orang-orang tua dan orang-orang yang buta akan teknologi. Dalam hal ini masih banyaknya orang-orang yang tidak paham dengan media elektronik sehingga mengakibatkan kekeliruan dan kesalahan dalam memilih calon. Hal ini bisa dilihat dalam pelaksanaan PILKADES yang dilakukan serentak di desa Wonodadi, adapun permasalahan yang terjadi berdasarkan hasil wawancara dari Pak sebagai Sekretaris Desa Wonodadi, beliau mengatakan terdapat beberapa masalah yang dihadapi seperti kurangnya fasilitas atau sarana dan prasarana seperti alat *E-voting* yang terbatas dikarenakan biaya yang dikeluarkan sangat besar untuk membeli alat tersebut. Hal ini mengakibatkan beberapa orang menunda pemberian suara dengan alasan mereka mempunyai urusan/kepentingan yang harus dikerjakan. Sehingga kebanyakan dari mereka

yang telah menunda tersebut menjadi malas untuk kembali mengikuti pemilihan ini. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan bagaimana penggunaan *E-voting*. Dan masalah yang sama dengan pelaksanaan pemilihan sebelumnya yakni kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan tersebut. Padahal dengan adanya sistem baru dalam pelaksanaan pemilu ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan adanya rasa ingin tahu masyarakat akan kegunaan *E-voting* terhadap pemilu, kebanyakan mereka dari kalangan yang tidak relatif muda tidak mengikuti atau menggunakan hak pilih mereka karena ketidakpahaman akan metode *E-voting* itu sendiri. Ketidaktahuan warga dalam sistem *Electronic Voting* karena warga desa Wonodadi masih banyak yang lanjut usia karena bagi mereka adalah hal yang sangat baru untuk dipakai apalagi sampai diterapkann dalam sistem pemilihan, jangankan untuk memegang komputer memegang handphone sajameraka tidak bisa, dari hal ini sehingga mengakibatkan keikutsertaan panitia untuk mengintruksi si pemilih dalam bilik suara, hal ini sangat menjadikan asas pemilihan yang tidak luberjurdil yaitu langsung bebas rahasia jujur dan adil. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut untuk beberapa jam terjadi gangguan sehingga antrian warga untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS terjadi penumpukan, butuh waktu yang cukup lama untuk menangani gangguan pada sistem sehingga masyarakat kehilangan minat untuk memilih mereka memilih pulang untuk mengurus keperluan lainnya, dari gangguan sistem tersebut yang menjadi Kekurangan pemungutan dengan *E-voting* sehingga mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan PILKADES perlunya partisipasi masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan legitimasi hasil pemilihan kepala desa karena dapat menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin rakyat di parlemen. Menurut Budiardjo (2008) partisipasi masyarakat di bidang politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta dengan memilih pemimpin dalam pemerintahan secara langsung atau tidak. Partisipasi masyarakat melalui suaranya berkaitan juga dengan kepercayaan rakyat terhadap sistem

pemilu yang akan menjadi wakil mereka dalam penyaluran aspirasi.

Permasalahan Tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan *E-voting* diharapkan akan mengalami kenaikan dibanding sebelumnya yang menggunakan sistem konvensional. Desa Wonodadi dimana pada saat ini telah mengalami pemekaran pekon yaitu dusun wonosari menjadi pekon wonosari dan dusun wonokarto menjadi pekon wonodadi utara, menjadi 8 dusun, dan satu-satunya desa yang menggunakan *E-voting* di Kecamatan Gadingrejo, dan dengan ini diharapkan menjadi percontohan untuk desa-desa di Kecamatan Gadingrejo lainnya. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum. Masalah- masalah yang terjadi saat pelaksanaan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap metode pemungutan suara menggunakan *E-voting*, sering adanya ketidakpercayaan yang kurang akan menimbulkan protes dari masyarakat sebagai pemilih karena menduga adanya permainan data yang menyebabkan salah satu calon merasa dirugikan yang mengakibatkan saksi tidak mau menerima hasil suara. Pada dampak terakhirnya partisipasi masyarakat terpengaruhi. Dalam konteks ini penulis mengkhususkan mengenai Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh peneliti maka diperoleh identifikasi masalah, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cara pelaksanaan metode *E-voting*.
2. Kurangnya Partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala desa.
3. Tidak maksimalnya pihak pelaksana pemilihan kepala desa memberikan arahan kepada masyarakat desa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan melihat kondisi permasalahan yang kompleks, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu banyak masyarakat yang kurang memiliki minat berpartisipasi pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan metode *E-voting* di Desa Wonodadi.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah yang ada maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu :

“Bagaimana Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi?”.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoretis maupun praktis.

#### **A. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah khasanah ilmu dan pengetahuan di bidang pendidikan politik dan kenegaraan, khususnya terkait Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian- penelitian sejenis di masa yang akan datang

## **B. Manfaat Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat.

### a. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu berfikir ilmiah dan penerapan keilmuan untuk dapat lebih mengetahui pemahaman tentang Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi.

### b. Manfaat bagi Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu

Bagi masyarakat Desa Wonodadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam metode *E-voting* yang dilaksanakan di desa wonodadi.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi informasi bagaimana sistem pelaksanaan Pemilihan Umum yang tepat dalam menangani Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* terhadap tingkat Partisipasi masyarakat sehingga dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dalam berpartisipasi aktif dalam bidang politik baik dalam bentuk pemilihan tingkat desa hingga tingkat kepala Negara.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **A. Ruang Lingkup Ilmu**

Ruang lingkup ini termasuk dalam ruang lingkup pendidikan Politik dan Kenegaraan khususnya tentang Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo.

### **B. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah membahas tentang Pengaruh Penerapan



Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo.

**C. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah Masyarakat di desa wonodadi. Kabupaten Pringsew.

**D. Wilayah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo,

**E. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahulu yang dikeluarkan oleh pihak Dekanat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Deskripsi Teoritis

#### A. Tinjauan Umum Tentang Partisipasi Politik Masyarakat

##### 1. Pengertian Partisipasi Politik

Istilah partisipasi sebenarnya diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikut sertakan pihak lain. Menurut pendapat Mubyarto (1997:35) bahwa mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu keberhasilan setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri (Elida:2015). Menurut Arimbi (1993:1) mendefinisikan partisipasi sebagai *feed-forward information and feedback information* (Elida IN Laily 2015). Dengan definisi ini, partisipasi masyarakat sebagai proses komunikasi dua arah yang terus menerus dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah sebagai pemegang kebijakan dan masyarakat di pihak lain sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari kebijakan tersebut. Dilihat dari beberapa pernyataan diatas, Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 246 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dan penghitungan cepat hasil Pemilu, dengan ketentuan:

- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu
- b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu
- c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
- d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.

Dalam Partisipasi masyarakat, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud tersebut dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau, seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

Partisipasi juga merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan. (Ramlan Surbakti 2007).

Keith Davis pada bukunya *Human Relations at work* (1962) dalam santoso (1988:13), menyatakan: Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Didalamnya terdapat tiga unsur (gagasan) yang penting artinya bagi para manager atau pemimpin

yang hendak menerapkan seni partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan ketiga gagasan tersebut, yaitu:

- a. Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada hanya keterlibatan secara jasmaniah.
- b. Kesiediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya.
- c. Tanggung jawab merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota artinya ada rasa *sense of belongingness*

Sedangkan Marjono (Salam Ramlan, M. 2010:11) mengartikan partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi/kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki. Dari beberapa uraian di atas bahwa partisipasi ialah ikut atau turut, Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar dengan menyumbangkan ide, perasaan, kesiediaan dan dukungan tanggung jawab kepada suatu badan untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.

Partisipasi politik (Sitepu, 2012) adalah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik

adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.(Primandha Sukma Nur Wardhani 2018) .

Menurut McClosky (dalam Budiarto, 1998) bahwasanya partisipasi politik merupakan suatu kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.(Bulqiyah, Muadi, and Tawakkal 2019). Pentingnya partisipasi rakyat di negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, maka rakyat memiliki power dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan, melalui keterwakilan maupun langsung dan pernyataan pendapat baik lisan ataupun tulisan yang dilindungi secara konstitusional, Karenanya hakikat dari demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang turut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Roth dan Wilson, kegiatan partisipasi politik secara konvensional mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilu (voting), menghadiri rapat umum (*campaign*), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan komunikasi dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen.( Yalvema:2012).

## 2. Model Dan Bentuk Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan environmentalist, gerakan perempuan gelombang feminist, protes mahasiswa, dan teror. Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor -kebiasaan|| partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi 4 bagian yaitu diantaranya:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda,

termasuk di sini adalah huru-hara, terror, kudeta, pembutuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Bila dilihat dari jumlah pelaku, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi berikut:

- a. Partisipasi individual, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh orang perorang secara individual, misalnya menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.
- b. Partisipasi kolektif, yakni kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif ini di bagi lagi menjadi dua, yaitu konvensional dan non-konvensional. Berdasarkan Saluran Politik Berdasarkan bentuk dan saluran politik, membagi partisipasi politik kedalam partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional.
  - 1) Partisipasi Konvensional Partisipasi ini dilakukan dengan saluran resmi dan dalam bentuk yang normal dalam demokrasi modern.
  - 2) Non Konvensional Partisipasi ini dilakukan melalui sarana tidak resmi dan dalam bentuk tidak normal.

Menurut Michael dan Phillip dalam (Sitepu,2012) menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk partisipasi politik yaitu :

- (1) Menduduki jabatan politik/administratif
- (2) Mencari jabatan politik atau administratif
- (3) Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
- (4) Keanggotaan pasif suatu organisasi
- (5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik (quasi-political)
- (6) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
- (7) Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
- (8) Voting (pemberian suara). (Chika, 2019)

Menurut Holil dalam (Nurcholis, dkk 2018), rakyat bisa berpartisipasi dalam sistem pemerintahan demokrasi karena didukung oleh tiga faktor yaitu :

- 1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pemimpinnya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya.
- 2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat.
- 3) Kemampuan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial.(Chika, 2019)

Jika dalam pernyataan Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas' oed(2011) bahwa bentuk partisipasi politik dibagi menjadi politik Konvensional dan Non Konvensional yaitu;

- a. Partisipasi politik konvensional yakni Pemberian suara atau voting, Diskusi politik, Kegiatan kampanye, Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan dan Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif
- b. Partisipasi politik non konvensional yakni Pengajuan petisi, Berdemonstrasi, Konfrontasi, Mogok, Tindak kekerasan politik terhadap harta benda berupa pengrusakan, pemboman, pembakaran dan Tindakan kekerasan politik terhadap manusia berupa penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington bahwa kegiatan yang dilakukan oleh warga negara preman dengan tujuan mempengaruhi



pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi itu dapat secara spontan, secara sinambung atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan. Didalam partisipasi politik hanya sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah (Samuel, Joan 1990).

Adapun beberapa aspek dari definisi inti diantara lain:

1. Mencakup kegiatan kegiatan akan tetapi tidak sikap sikap. Sebagai kontras, mendefinisikan partisipasi politik sebagai juga mencakup orientasi orientasi para warga negara terhadap politik, minat terhadap politik mereka yang nyata.
2. Kegiatan politik warga negara preman atau lebih tepat lagi perorangan-perorangan dalam peranan mereka sebagai warga negara preman dengan demikian kami menarik garis antara partisipasi politik dengan orang-orang profesional di bidang politik.
3. Para partisipan dapat berusaha untuk menggantikan pengambilan keputusan pada waktu enggan orang-orang lain yang mereka harapkan akan lebih tanggap terhadap preferensi-preferensi dari kebutuhan mereka yang lebih jangan terjadi, para partisipasi politik dapat mengubah aspek-aspek politik itu sendiri atau mengubah secara mendasar struktur sistem itu secara keseluruhan agar pemerintah bersikap lebih tanggap terhadap keinginan para partisipan.

Menurut Michael dan Philip 1971 bentuk-bentuk dalam partisipasi politik dibagi menjadi 3 yaitu berdasarkan:

1. Partai-partai politik/kelompok-kelompok kepentingan  
Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan bisa masuk kedalam bentuk aktif ataupun pasif, tersusun dari yang menduduki jabatan dalam organisasi hingga yang memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar

sumbangan atau iuran keanggotaan . dalam partai politik merupakan sebuah organisasi yang dimana anggota nya mempunyai azas keterikatan organisasi yang dimana lewat keanggotaannya dapat mengandung arti politik baik untuk organisasi maupun individu, dengan memperkokoh posisi yang ditawarkan dari organisasi dan dalam mempengaruhi perilaku politik individu yang bersangkutan.

## 2. Diskusi politik informal.

Suatu bentuk partisipasi yang informal dilakukan oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, baik ditempat-tempat bekerja atau di lingkungan sekitar. Peristiwa diskusi semacam itu bervariasi baik diantara individu maupun realasinya.mungkin terdapat banyak waktu-waktu krisis politik sedangkan diskusi dapat dirintangi atau didorong oleh sikap kekeluargaan, teman sekerja atau sahabat.

## 3. Kegiatan pemberian suara

Suatu bentuk partisipasi poltitik yang jelas nyata nya ialah kegiatan pemberian suara yang tetapi juga dalam bentuknya termasuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal ini menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. (Michael Rush, 2007).

### **3. Faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya suatu partisipasi masyarakat adalah tingkat kepercayaan atau trust masyarakat terhadap para pemimpin bangsa, kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Berdasarkan tinggirendahnya kedua faktor tersebut maka membagi partisipasi politik Samuel P. Huntington juga mendefinisikan partisipasi masyarakat

dibagi menjadi 2 macam yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif). Berbagai bentuk- bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). (Miriam ,2007)

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson sebagai berikut:

1. Faktor Sosial Ekonomi Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik, yaitu :
  - a. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan ikut mempengaruhi perilaku pemilih masyarakat di desa malang Rapat. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik dan persoalan- persoalan sosial yang diterima semakin meningkat dan menciptakan minat dan kemampuannya dalam berpolitik. Karena itu pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk di perhatikan.
  - b. Pengaruh Keluarga Keluarga merupakan pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat di Desa. Pemimpin keluarga yaitu ayah adalah orang yang mempengaruhi

dalam keluarga tersebut, memilih atau tidak ikut memilih akan memberikan pengaruh terhadap anggota keluarga lainnya.

- c. Pekerjaan, Pekerjaan tertentu sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik. Para pemilih yang bekerja diluar lembaga-lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran mereka dalam pemilihan umum, berbeda dengan pemilih yang bekerja dilembaga yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah, pemilih tersebut cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya pada saat pemilu. Biasanya para pegawai negeri tingkat kehadiran mereka lebih tinggi dikarenakan mereka sering langsung berhubungan dengan kebijakan pemerintah.

## 2. Faktor Politik Faktor politik meliputi :

- a. Pengetahuan masyarakat akan proses pengambilan keputusan yang menentukan keputusan yang akan diambil.
- b. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyatnya sebagai interaksi yang mempengaruhi kelakuan manusia dalam suatu keadaan yang bersifat politik.
- c. Kesadaran politik Dapat diartikan perhatian seseorang terhadap permasalahan yang ada dilingkungan masyarakat maupun politik.

Jika menurut pendapat Angell dalam Lisdiana (2013) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu:

Yang pertama usia, kedua jenis kelamin, ketiga pekerjaan dan penghasilan, Keempat lamanya tinggal dan lamanya seseorang tinggal serta lamanya seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitar maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat partisipasinya.

- a. Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada.

Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis Kelamin Dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah -di dapur|| yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pekerjaan dan Penghasilan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi

#### **4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi**

Pemilu menjadi indikator suatu negara berdemokrasi atau tidak, sebab sebuah negara yang memberikan keluasaan warganya untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin atau perwakilannya di parlemen menandakan negara tersebut telah berupaya berdemokrasi, meskipun partisipasi merupakan salah satu elemen dasar di dalam polyarchy, nama lain dari demokrasi menurut Robert Dahl (1971), di dalam demokrasi perwakilan partisipasi itu lebih dimaksudkan sebagai keterlibatan warga Negara di dalam pemilu, contohnya terlihat dari penjelasan Joseph Schumpeter, salah satu ilmuwan politik penganut demokrasi elitis(perwakilan). Dalam pandangannya, peran politik warga Negara adalah pada pemilu, sementara para pemimpin yang terpilih merupakan orang-orang kunci dalam proses pembuatan

keputusan-keputusan, dalam pandangan itu, keterlibatan warga Negara di dalam proses politik memang lebih banyak berhenti pada proses pemilihan. (Marjian, 2010)

Menurut Conyers (1994:154), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. (Liando, 2016)

Oleh karena itu, demokrasi melalui kegiatan Pemilu juga mensyaratkan warga untuk ikut terlibat dalam memberikan suaranya. Tanpa adanya upaya melibatkan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi kegiatan formalitas demokrasi. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan hal yang sangat penting, disini masyarakat sebagai pemegang kekuasaan utama dalam negara Demokrasi. Dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang baik tentunya peningkatan Partisipasi diperlukan. Semakin banyaknya ruang partisipatif maka potensi pelanggaran semakin sempit karena dalam pelaksanaannya diawasi oleh publik. Selain itu partisipasi politik dapat bermanfaat untuk:

- a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah dalam bentuk pengiriman wakil atau pendukung, pembuatan pernyataan yang isinya memberikan dukungan terhadap pemerintah, dan pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik
- b. Menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah dengan harapan agar pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah kelemahan tersebut
- c. Partisipasi sebagai tantangan terhadap penguasa supaya terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik. (Sa'ban, dkk 2019)

Semua warga negara memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam mengevaluasi dan menentukan pemimpinnya, sehingga partisipasi politik, dalam hal ini keikutsertaan masyarakat dalam PILKADES, menjadi penting. Pada sisi yang sama, pemahaman yang baik terhadap peran-peran strategis warga negara juga akan mendorong kualitas demokrasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Masyarakat**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Menurut Peter L. Berger, definisi masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya, pengertian dari suatu kompleks bahwa keseluruhan itu terdiri atas bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan. Misalnya di dalam tubuh manusia terdapat bagian-bagian yang membentuk suatu sistem organik biologis seperti, otot, jantung, hati, otak dan organ lainnya dari bagian itu terbentuklah suatu sistem yang disebut manusia. Begitu pula terhadap masyarakat, yang di dalam terdiri bagian-bagiannya yang membentuk hubungan masyarakat. Masyarakat Menurut Wikipedia adalah sekelompok

mahluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. Pengertian masyarakat menurut (Hasan 2005) masyarakat adalah golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya disini adalah mereka saling mempengaruhi dalam pertalian kebatinan yang terjadi dengan sendirinya di dalam suatu masyarakat tersebut. Masyarakat bukan hanya penjumlahan orang saja tetapi diantara mereka ada pertalian ikatan batin dan kesatuan, tetapi di dalam kesatuan tersebut. mengalami proses dan mengalami perubahan dalam kehidupannya Menurut (Suharto 2006) dalam masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama, meyakini satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya saru tempat yang sama. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai ikatan yang terjalin secara langsung, memiliki tata cara hidup yang diatur secara bersama berdasarkan adat istiadat yang ada di dalam suatu masyarakat tersebut, saling membantu dan saling berpengaruh satu sama lain.

## **2. Kedudukan Masyarakat dalam Demokrasi**

Demokrasi yang kita ketahui artinya dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Demokrasi juga memiliki banyak arti yang luas, jika dilihat dari faktual nya, demokrasi di Indonesia masih berjalan sebagai proses dimana secara substansial keseimbangan dari berbagai unsur masyarakat baik partai, lembaga antar pemerintah, organisasi masyarakat menjadi tema yang menarik untuk dikaji. Menurut Mas' oed(1999) demi kelestarian demokrasi diperlukannya sebuah kesepakatan



dari rakyat mengenai makna demokrasi sendiri dari segi mekanisme kerja demokrasi dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan. (Faturahman,2018) Kekuatan demokrasi berasal dari kehendak rakyat sendiri bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama sehingga persoalan demokrasi berkaitan dengan persoalan terakomodirnya atau keterwakilan kehendak rakyat itu sendiri.

Rakyat selaku mayoritas memiliki suara menentukan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah melalui saluran-saluran yang tersedia. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Bila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan bernegara, maka pemerintah tersebut sah. Dalam sistem demokrasi, posisi rakyat sama tingginya di hadapan hukum dan pemerintahan. Rakyat memiliki kedaulatan yang sama, baik keselamatan untuk memilih atau dipilih. Ciri utama demokrasi yaitu berlaku dan tegaknya hukum di masyarakat. Jika hukum tidak berlaku, maka yang terjadi adalah anarkhi bukan demokrasi. Sehingga ciri utama sistem demokrasi adalah tegaknya hukum di masyarakat dan diakuinya Hak Asasi Manusia (HAM) oleh setiap anggota masyarakat.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam Demokrasi, Salah satu faktor pendukung dalam Pemilu adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pemilu. Meskipun jika pada akhirnya tingkat partisipasi masyarakat rendah tidak dapat membatalkan hasil Pemilu, namun hal ini dapat menunjukkan kesadaran politik masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai unsur sentral suatu daerah. Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi merupakan hal yang sangat penting, disini masyarakat sebagai pemegang kekuasaan utama dalam negara Demokrasi. Dalam meningkatkan kualitas demokrasi yang baik tentunya peningkatan

Partisipasi diperlukan. Masyarakat dan demokrasi tidak bisa dipisahkan, karena di dalam proses demokrasi yang berperan penting adalah masyarakat. Jika masyarakat sudah tidak mau terlibat dalam demokrasi maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangatlah mudah dimanipulasi dan cenderung merugikan masyarakat itu sendiri. Elit-elit politik juga yang cenderung mementingkan kepentingan individu dan kelompoknya akan membuat masyarakat apatis keikutsertaannya dalam proses demokrasi.

### **C. Tinjauan Umum Tentang *E-voting***

#### **1. Pengertian *Elektronik Voting***

Elektronik Voting merupakan bentuk dari pengembangan ilmu elektronik yang dimana pengambilan keputusan menggunakan alat-alat elektronik. *E-voting* yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik (Dihan 2010) . Proses pendaftaran pemilih, pelaksanaan pemilihan, penghitungan suara, dan pengiriman hasil suaradilakukan secara elektronik atau digital . Pilihan teknologi yang digunakan dalam implementasi dari *E-voting* sangat bervariasi, seperti penggunaan smart card untuk otentikasi pemilih, penggunaan internet sebagai pemungutan suara, penggunaan touch screen sebagai penggantikartu suara, dan masih banyak variasi teknologi yang digunakan.

Penggunaan teknologi ini di satu sisi memberikan banyak kemudahan, kecepatan, sedangkan disisi lain menimbulkan kerawanan. Kerawanan ini terkait dengan keamanan informasinya.(Mahardika, 2017)

#### **2. Manfaat *E-voting***

Penerapan *E-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari pemilu yang diadakan secara konvensional. Riera dan

Brown serta de Vuyst dan Fairchild menawarkan manfaat yang akan diperoleh dalam penerapan *E-voting* sebagai berikut:

- 1) Mempercepat penghitungan suara
- 2) Hasil penghitungan suara lebih akurat
- 3) Menghemat bahan cetakan untuk kertas suara
- 4) Menghemat biaya pengiriman kertas suara
- 5) Menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik (cacat)
- 6) Menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara (TPS)
- 7) Kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa
- 8) Menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara
- 9) Dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. (Gusti, Budi 2021)

### **3. Tujuan *E-voting***

Sesuai dengan kebijakan baru dalam pemilihan tentunya metode *E-voting* mempunyai suatu tujuan yaitu:

1. Melakukan pemungutan suara dengan hemat biaya
2. Penghitungan cepat
3. Sistem yang aman
4. Mempermudah untuk dilakukan audit

### **4. Metode *E-voting***

Metode *E-voting* Pelaksanaan pemilihan umum pada hakekatnya dapat dibagi menjadi dua cara yakni cara konvensional yang berbasis kertas dan *E-voting* yang berbasis pada teknologi online.

*E-voting* berbasis online dapat dilaksanakan dalam beberapa metode ;  
BPPT dalam:

1. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Di samping itu, tanda yang melewati batas kotak marka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut sebagai *paper-counting*.
2. Sistem Direct Recording Electronic (DRE). Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan di dalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun offline ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara realtime dan online.
3. Internet voting. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan di mana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berkecepatan tinggi dan keamanan yang handal.

##### **5. Prinsip-prinsip dalam Metode *E-voting***

Prinsip-prinsip Dalam Penerapan *E-voting* Supaya *E-voting* dapat diterapkan dengan efektif dan menghasilkan hasil penghitungan suara yang dapat diakui oleh seluruh lapisan masyarakat, di samping prinsip

Luber dan Jurdil yang ada pada sistem pemilu sekarang, maka penerapan *E-voting* harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Eligibility and Authentication* (Kelayakan dan Otentikasi ) pemilih hanya berwenang harus dapat memilih
2. *Uniqueness* (Keunikan) pemilih hanya dapat memilih satu
3. *Accuracy* (Ketepatan) sistem pemilu harus mencatat suara dengan benar
4. *Integrity* (Integritas) orang seharusnya tidak dapat diubah, ditempa, atau dihapus tanpa deteksi
5. *Reability* (Keandalan) sistem pemilu harus bekerja kokoh, tanpa kehilangan apapun orang, bahkan dalam menghadapi berbagai kegagalan, termasuk kegagalan mesin voting dan kerugian total komunikasi Internet
6. *Secrecy* (Kerahasiaan) tidak ada yang harus dapat menentukan bagaimana setiap individu sebagai, dan pemilih tidak dapat membuktikan bagaimana mereka sebagai (yang akan memfasilitasi penjualan orang atau paksaan)
7. *Flexibility* (Keluwesannya) peralatan pemilu harus memungkinkan untuk berbagai format suara pertanyaan (misalnya, menulis-di calon, pertanyaan survei, beberapa bahasa); kompatibel dengan berbagai platform standar dan teknologi; dan dapat diakses oleh penyandang cacat
8. *Convenience* (Kenyamanan) pemilih harus dapat memberikan suara cepat dengan peralatan minim atau keterampilan
9. *Certifiability* (Sertifikasi) sistem pemilu harus diuji sehingga pejabat terpilih memiliki keyakinan bahwa mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan
10. *Transparency* (Transparansi) pemilih harus mampu memiliki pengetahuan umum dan pemahaman tentang proses pemungutan

suara; dan 11) *Cost-effectiveness* (Efektivitas biaya) —sistem pemilu harus terjangkau dan efisien (*Internet Policy Institute, 2001*).

## 6. Kelebihan Metode *E-voting*

Dalam penggunaan metode *E-voting* tentunya mempunyai kelebihan dibandingkan dengan metode lainnya yaitu:

- 1) *E-voting* dapat Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih.  
Teknologi *E-voting* memungkinkan pemilih menghadap langsung ke komputer untuk menentukan pilihan. Berhadapan secara visual memungkinkan lebih dipahami bagi pemilih yang cacat, menggunakan bahasa minoritas, ataupun buta huruf dan juga dapat meningkatkan aksesibilitas, contohnya, memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui Internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri.
- 2) Dapat mencegah daripada kecurangan. Apabila sistem *E-voting* sudah terintegrasi dengan KTP (elektronik), maka kecurangan dalam pemilihan dengan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali akan lebih cepat terdeteksi. Dengan demikian, momen pemilihan tersebut tidak hanya dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan surat undangan atau pemilih fiktif, tetapi juga sekaligus dapat dijadikan untuk mengakurasi data penduduk.
- 3) Penanganan yang lebih efektif dan lebih efisien daripada sistem pemilihan sebelumnya yang memiliki tingkat cukup rumit di dalam penyelesaiannya sehingga memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan. serta dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan bagi pemilih dengan sistem *E-voting*.
- 4) Berpotensi bisa menghemat biaya dalam jangka waktu yang panjang, melalui penghematan waktu pekerja/panitia Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan mengurangi biaya untuk produksi

surat suara, pencetakan, dan pendistribusian surat suara.(Ikhsan 2014)

## 7. Kekurangan Metode *E-voting*

- 1) Dapat Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang telah melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan, Sehingga dapat menimbulkan risiko manipulasi data oleh orang dalam/panitia penyelenggara pemilihan tersebut dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luardan memungkinkan kecurangan-kecurangan dapat terjadi dengan cara masif oleh sekelompok orang. Dan selanjutnya adalah factor Pemilihnya sendiri yang belum faham atau belum pernah melakukan pemilihan dengan menggunakan teknologi *E-voting* sehingga terjadi kesalahan dalam mengoperasikannya, akibatnya banyak kegagalan dalam melakukan pemilihan Kandidat yang dituju.
- 2) Kurangnya standar yang disepakati untuk menerapkan sistem e-voting sehingga memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas dan menjadi hal buruk dikemudian hari bagi pelaksanaan *E-voting*. Begitupula dalam hal perangkat kerasnya seperti peralatan/*devices* kadang-kadang tidakbisa merespon dengan cepat serta akurat. Dan juga dari sistem Faktor Internal dari *E-voting* (sisi pemakaian) yaitu keabsahan pemakai REV (*Remote Electronic Voting*), artinya jika yang menggunakan sistim REV tidak memenuhi kualifikasi dalam skillyang dimilikinya maka akan menyebabkan kegagalan/eror. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem bagi yang bukanahlinya.

- 3) Tidak dapat meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan, contohnya, berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, serta kelembaban. Ini dapat menimbulkan kekhawatiran yang muncul dan dapat terjadinya kecurangan yang dapat memanipulasi hasil pemungutan suara.
- 4) Standar mesin *E-voting* yang akan digunakan belum tentu disepakati secara bersama-sama. Kesepakatan akan standar mesin *E-voting* adalah hal yang sangat utama, karena apabila pengadaan mesin tidak memakai standar yang disepakati bersama dapat saja terjadi suatu proses delegitimasi terhadap proses dan hasil dari sebuah pemilihan. (Ikhsan, 2014)

Kendala lainnya adalah soal kemampuan yang dimiliki Indonesia untuk dapat mendistribusikan perangkat-perangkat untuk mekanisme *E-voting* secara serentak. Selain itu, alat *E-voting* membutuhkan dukungan infrastruktur memadai seperti listrik dan jaringan internet. Masalah terbesar adalah ketika alat ini dibawa ke wilayah-wilayah terpencil dapat diragukan berjalannya fungsi *E-voting*.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Kepala Desa**

### **1. Pemilihan Kepala Desa**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah pesta demokrasi rakyat pedesaan yang di dalamnya kebebasan memilih rakyat tetap terjamin, lebih lanjut dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 112 Tahun 2014, Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa serta mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya.



Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Menyebutkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat, pemilihan kepala desa bersifat, umum, bebas, terbuka, jujur dan adil yang dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan. Pilkades merupakan peristiwa politik di tingkat desa yang menunjukkan bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang sudah berpolitik secara langsung dari awalnya. Sesuai pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pasal 4 ayat 2 menyebutkan, Pada pemilihan kepala desa dilakukan setiap periode enam tahun dan dapat dipilih kembali dalam 2 kali periode berikutnya baik secara berturut-turut maupun tidak.

## **2. Syarat-syarat menjadi calon kepala desa**

Setiap calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 33 dan Peraturan Menteri Nomor 112 tahun 2014 adalah:

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran

- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- k. Berbadan sehat
- l. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah

### **3. Asas-Asas Dalam Pemilihan**

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Menurut Mariana, (2008) Pada waktu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga masyarakat desa dimana pemilihan kepala desa ini menggunakan asas LUBER, yaitu:

1. Langsung  
Asas ini mempunyai arti bahwa pemilih mempunyai hak suara untuk memberikan suaranya menurut hati nurani tanpa melalui perantara atau diwakilkan.
2. Umum  
Dalam asas ini mengandung arti bahwa semua pemilih adalah penduduk desa yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melaksanakan perkawinan, dan telah memenuhi syarat yang sudah ditentukan atau diatur oleh undang-undang.

### 3. Bebas

Asas ini berarti pemilih dijamin keamanannya tanpa pengaruh tekanan dan paksaan dari siapapun dan dengan apapun.

### 4. Rahasia

Dalam asas ini mengandung arti bahwa pemilih dalam memberikan suaranya didalam bilik suara dijamin kerahasiaannya tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan cara apapun. (Mariana ,2008).

## 4. Syarat-syarat menjadi pemilih

Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Pasal 10, 11, 12, 13 dan 14, Dalam pemilihan kepala desa tentunya masyarakat harus memenuhi syarat sebagai pemilih calon kepala desa yaitu:

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
  - e. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud, tidak dapat menggunakan hak memilih.
3. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.

4. Pemutakhiran sebagaimana dimaksud dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
5. Berdasarkan daftar pemilih, Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
6. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
7. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
8. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
9. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia.
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut
  - c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
10. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
11. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
12. Pemilih didaftar sebagai pemilih tambahan.
13. Pencatatan data pemilih, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

## 2.2 Kajian yang Relevan

Tabel 2. 1 Peneliti Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rizki Novaldi, dan M. Fachri Adnan (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E- Voting</i> Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Waliagari Batu Taba Kabupaten Agam Tahun 2019	Berdasarkan pada temuan yang telah dipaparkan oleh peneliti tentang Pengaruh <i>E-voting</i> terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Waliinagari Batu Taba Tahun 2019. Setelah penelitian dilakukan dan telah disertai dengan analisis data, dapat dibuktikan dari analisis data yang telah dilakukan tersebut kalau variabel <i>E-voting</i> berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Selanjutnya, variabel <i>E-voting</i> berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi politik karena nilai Adjusted R Square 0,706 atau sebesar 71 % pada taraf signifikansi 0,000. Dan sisanya 29% dari variabel lain yang tidak diteliti yang mempengaruhinya dalam penelitian ini. Hasil analisis

		<p>ini membuktikan teori Qadah dan Taha dalam (Azizah, 2018) yang mengatakan tujuan dari penerapan <i>E-voting</i> adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengurangi biaya dan meningkatkan validitas dan akurasi pemilu. Sehingga dapat dikatakan semakin besar kekuatan pengaruh <i>E-voting</i> maka semakin besar pula Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Walinagari Batu Taba Tahun 2019.</p>
Novianti Dwi (2015)	-Partisipasi politik masyarakat dalam pilkades Malang Rapat, kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan tahun 2013	<p>Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat Malang rapat pada pemilihan kepala desa 2013 yang lalu sangat rendah yang diakibatkan oleh faktor ekonomi masyarakat sehingga membuat masyarakat lebih mementingkan pekerjaan ketimbang mengurus masalah politik dan juga faktor politik yang kurang pendidikan masyarakat, maka dapat mempengaruhi pengetahuan masyarakat untuk berpartisipasi.</p>
Mhd Kemal	Perbandingan	Perbandingan sistem <i>E-voting</i>

<p>Habibie Gulto (2020)</p>	<p>Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem <i>E-voting</i> Dengan Konvensional Di Indonesia</p>	<p>dengan Konvensional dapat dicermati dalam hal <i>E-voting</i> lebih efisien, keakuratan, konkret, serta transparansi. Metode <i>E-voting</i> lebih unggul dalam Waktu yang di butuhkan ketika melakukan voting Pemilihan Kepala Desa lebih cepat dan dapat menghemat tenaga sumber daya karena aplikasi sistem tersebut dirancang untuk mendapatkan langsung hasil voting yang lebih cepat dan akurat. Penelitian ini berhasil menerapkan sistem <i>E-voting</i> Pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari sistem pendaftaran pemilih, verifikasi data pemilih, verifikasi data pemilih dengan smart card, absensi data pemilih, proses <i>E-voting</i> dan dashboard hasil voting dengan menampilkan jumlah voting dalam bentuk angka, persen (%), grafik dan diagram. Memilih dengan menggunakan kertas surat suara lebih tidak efisien karena memerlukan kertas dalam jumlah yang banyak dan juga setelah itu kertasnya pada umumnya di buang (atau tidak dipakai kembali pada</p>
---------------------------------	--	--

		pemilihan berikutnya).
--	--	------------------------

Berdasarkan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini yaitu berbeda pada tujuan penelitian, dimana peneliti lebih mengkaji tentang Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo.

Mengkaji tentang bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang menggunakan metode *E-voting* pertama kalinya dalam pemilihan kepala desa pada tahun 2022 di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo. Partisipasi politik masyarakat merupakan faktor penting pada suatu pengambilan keputusan terlebih lagi adanya pembaruan dari pemerintah pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi menggunakan Metode *E-voting*, sehingga oleh peneliti mengkaji tentang Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.

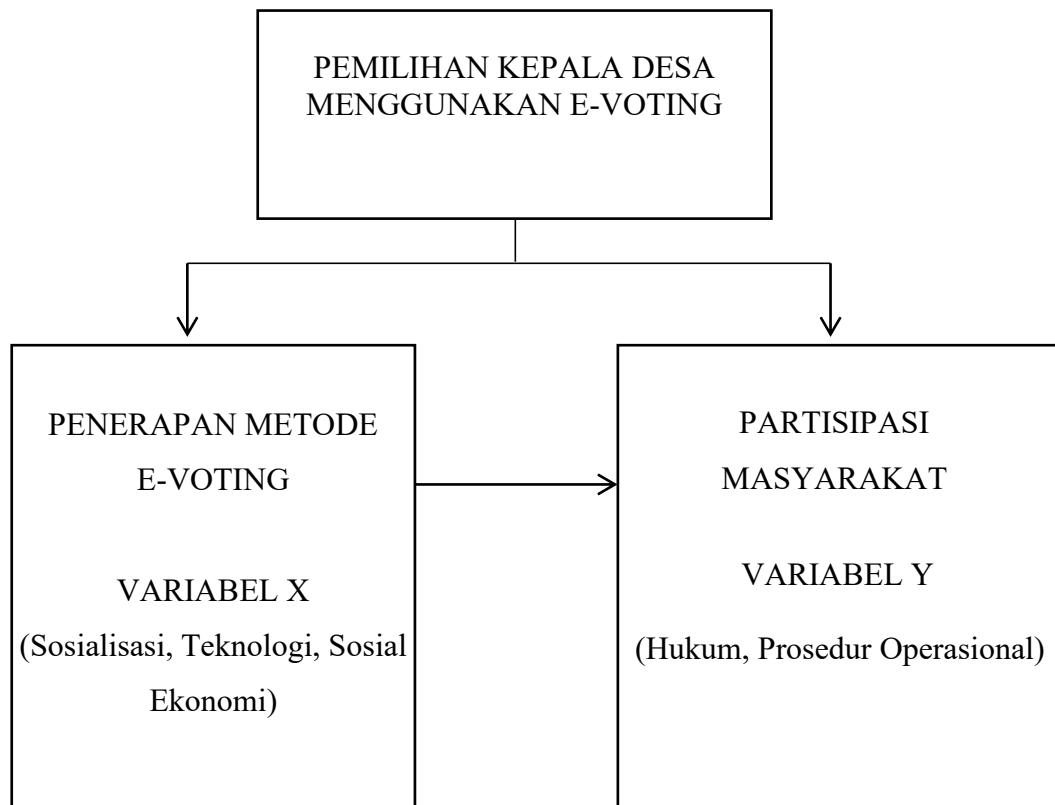
### 2.3 Kerangka Pikir

Pentingnya partisipasi rakyat di negara demokrasi sangat menentukan keberlangsungan hidup suatu negara, maka rakyat memiliki power dalam pengambilan keputusan di bidang politik dan bidang pemerintahan. Keterlibatan politik merupakan agenda individu ataupun organisasi orang untuk ikut serta secara aktif di kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin Negara dan terlibat dalam kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk dari partisipasi politik secara konvensional merupakan jenis-jenis keterlibatan



yang umum dan lazim ditemui, seperti pemberian suara, melibatkan diri dengan organisasi yang mempunyai kepentingan, melibatkan diri dengan partai politik, dan komunikasi dengan pejabat politik atau administrasi. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi pemilih, Pemilu hanyalah menjadikan sebagai objek semata dan salah satu kritiknya adalah ketika masyarakat tidak merasa memiliki dan acuh tak acuh terhadap pemilihan umum. Selama ini pemilihan kepala desa dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan permasalahan yang ditimbulkan oleh ulah aparat atau panitia pemilihan, hingga kepada masyarakat pengguna hak suara. Pembaharuan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan memanfaatkan teknologi yang mampu memberikan solusi yaitu dengan metode *Electronic Voting*. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masyarakat masih banyak yang tidak peduli dan lebih mementingkan urusan pribadi dan terdapat beberapa faktor yang membuat masyarakat tidak berpartisipasi, sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi terpengaruh

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

## 2.4 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan kerangka berpikir dari permasalahan diatas, maka dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.  $H_0$ : Jika nilai signifikansi (Sig) lebih besar ( $>$ ) dari probabilitas 0.05, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, tidak ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wonodadi.
2.  $H_1$ : Jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil ( $<$ ) dari probabilitas 0.05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga ada pengaruh yang signifikan penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa Wonodadi.

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini juga menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 20 dan Microsoft Excel 2010. Dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan dari satu variabel dengan variabel lainnya dengan angka. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### A. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono : 2017). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah masyarakat yang ikut serta pada pemilihan kepala desa di desa Wonodadi menggunakan metode *E-voting*, adapun jumlah keseluruhan masyarakat sebagai pemilih tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Jumlah Pemilih Tetap

NO.	RW	JUMLAH PEMILIH TETAP
1	RW 01	500
2	RW 02	1.305

3	RW 03	997
4	RW 04	1000
5	RW 05	1000
6	RW 06	401
7	RW 07	864
8	RW 08	480
<b>TOTAL</b>		<b>6547</b>

Sumber Data: Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

## B. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Menurut (Sugiyono : 2017) –Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili)l. Populasi dalam penelitian ini adalah warga di RW 02 yang berjumlah sebanyak 1.305 (seribu tiga ratus lima) orang yang merupakan daftar pemilih tetap (DPT) terbesar dari 8 (delapan) dusun yang ada di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Dikarenakan jumlah DPT Dusun RW 02 yang begitu besar, maka peneliti

memutuskan untuk menggunakan rumus Taro Yamaneu (dalam Riduwan : 2013) rumus dimaksud adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{n}{N (d^2) + 1}$$

Keterangan :

n =Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presisi atau batas toleransi kesalahan pengambilan sampel.

Dalam penelitian ini jumlah populasi sebanyak 281 siswa dimasukkan ke dalam rumus di atas dengan tingkat presisi yang ditetapkan yaitu 10%. Jadi dijabarkan sebagai berikut:

$$= \frac{1.305}{(d^2) + 1} = \frac{1.305}{1.305 (0,1^2) + 1} = \frac{1.305}{14,05} = 92,88$$

n = 92,88 dibulatkan menjadi 93 Pemilih tetap

Dengan perhitungan diatas jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 93 pemilih tetap. Teknik penentuan pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random sampling.

Dimana teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

### 3.3 Variabel Penelitian

Menurut Sugiono (2017), variabel penelitian adalah segala sesuatu (dapat berbentuk apa saja) yang ditetapkan oleh peneliti sehingga untuk dianalisis dan dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis variabel, yaitu:

#### A. Variabel Independem (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh terhadap perubahan atau bahkan menjadi penyebab timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerapan Metode *E-voting* (variabel X).

#### **B. Variabel *Dependen* (Terikat)**

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengaruh variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat (variabel Y).

### **3.4 Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel**

#### **1. Definisi Konseptual**

Definisi konseptual variabel digunakan untuk menegaskan tentang masalah yang diteliti, definisi konseptual variabel adalah penegasan serta penjelasan suatu konsep dengan menggunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan sisi-sisi (dimensi) pengukuran tanpa menunjukkan deskripsi dan indikatornya dan bagaimana cara mengukurnya.

##### **1. Penerapan Metode *E-voting***

Penerapan Metode *E-voting* merupakan proses pemilihan umum yang mengambil manfaat dari perangkat elektronik, di mana seluruh atau sebagian proses kegiatannya, dimulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, sampai penghitungan suara, dilaksanakan secara elektronik. Tujuan pemakaian *E-voting* bukan hanya untuk mempercepat proses kegiatan pemilihan umum saja, namun ada juga menjaga orisinalitas dari suara pemilih, kerahasiaan pemilih, dan juga menjaga keakuratan penghitungan suara.

## 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat Partisipasi Masyarakat merupakan suatu tingkatan dimana sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

## 2. Definisi Operasional

Untuk dapat memahami objek permasalahan yang ada di dalam penelitian ini secara jelas, maka diperlukan variabel operasional. Menurut Suryabrata (2012) menyatakan bahwa, -definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dan dapat diamati.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi operasional merupakan variabel yang dapat diamati melalui pengoperasionalan variabel menggunakan proses pengukuran yang tepat.

### 1. Penerapan Metode *E-voting*

Metode *E-voting* adalah yaitu suatu metode pemungutan suara dan perhitungan suara dalam pemilihan umum dengan menggunakan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, dan menghasilkan jejak audit. Dalam pelaksanaannya di desa Wonodadi menggunakan:

A. *Sistem Direct Recording Electronic (DRE)* Metode ini dilakukan dalam penyelenggaraan pilkades di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo dengan cara para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau panel/papan suara elektronik sehingga hasil perhitungan suaranya lebih akurat.

### 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Marjono (Salam Ramlan, M. 2010) mengartikan partisipasi masyarakat pada hakekatnya adalah keterlibatan/keikutsertaan secara aktif dalam proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh

pribadi/kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki.

### 3.5 Rencana Pengukuran Variabel

Rencana pengukuran variable dalam penelitian ini menggunakan butir-butir soal yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang pengaruh penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi. Dalam penelitian ini variabel (X) yang akan diukur adalah penerapan *metode E-voting* (Y) tingkat partisipasi masyarakat. Angket yang digunakan adalah angket tertutup berisi indikator tentang pengaruh penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi. Pengukuran variabel ini menggunakan alat ukur berupa angket. Angket yang disebar dan diberikan kepada responden bersifat tertutup. Setiap soal memiliki jawaban a,b dan c sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah tersedia. Skala angket yang digunakan di dalam penelitian ini adalah skala *Likert*. Skala *Likert* dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Instrumen penelitian dalam skala *Likert* dapat dibuat dalam bentuk *checklist* maupun pilihan ganda. Untuk melakukan kuantifikasi maka skala tersebut kemudian diberi angka-angka sebagai simbol agar dapat dilakukan perhitungan. Rencana pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan kategori sebagai berikut:

#### A. Berpengaruh

Penerapan *E-voting* yang dinyatakan sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat apabila masyarakat wonodadi mampu menunjukkan kesadaran berpolitik baik berpartisipasi secara langsung atau tidak dengan menggunakan hak pilihnya.

#### B. Cukup Berpengaruh



Penerapan Metode *E-voting* yang dinyatakan sangat cukup berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat apabila masyarakat wonodadi mampu berpartisipasi aktif pada pemilihan kepala desa dengan baik.

### C. Kurang Berpengaruh

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

### A. Teknik Pokok

#### 1. Angket

Angket adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan dan pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab responden secara bebas sesuai dengan pendapatnya (Arifin : 2012). Menurut Sugiyono (2011) angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Sasaran angket dalam penelitian ini adalah masyarakat desa wonodadi. Tujuan dari pemberian angket ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi dan menjelaskan pengaruh penerapan metode *E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi.

Dalam penelitian ini menggunakan angket yang bersifat tertutup sehingga responden menjawab pertanyaan dari tiga alternatif jawaban, yaitu (setuju), (kurang setuju), (tidak setuju) yang setiap jawaban diberi nilai bervariasi. Variasi nilai atau skor dari masing-masing jawaban dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Untuk menjawab yang sesuai dengan harapan adalah alternatif jawaban (setuju) akan diberi nilai atau skor (3)
- 2) Untuk menjawab yang cukup sesuai dengan harapan adalah alternatif jawaban (kurang setuju) akan diberi nilai atau skor (2)

- 3) Untuk menjawab yang kurang sesuai dengan harapan adalah alternatif jawaban (tidak setuju) akan diberi nilai atau skor (1)

Berdasarkan hal di atas maka akan diketahui bahwa nilai tertinggi adalah (3) dan nilai terendah adalah (1).

## **B. Teknik Penunjang**

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong : 2016). Wawancara dilakukan secara lisan dengan tatap muka secara individu saat studi pendahuluan melalui observasi terhadap guru kelas. Jenis wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur sehingga pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang ditanyakan. Teknik wawancara digunakan apabila terdapat data yang kurang jelas ataupun kurang lengkap dari hasil angket yang diberikan kepada responden. Wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi secara langsung pada objek penelitian untuk menunjang data penelitian. Meskipun demikian, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara harus masih berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan secara *offline*, pihak yang diwawancarai adalah Sekertaris desa, panitia pelaksana dan masyarakat desa wonodadi.

## **3.7 Uji Validitas dan Uji Reliabelitas**

### **A. Uji Validitas**

Menurut Suharsimi Arikunto (2010) bahwa –sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sugiyono menyatakan bahwa instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Maka dapat

diketahui bahwa, uji validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Berdasarkan uraian tersebut uji validitas dapat diartikan sebagai kontrol langsung terhadap teori- teori yang telah melahirkan indikator variabel yang disesuaikan dengan maksud dan isi butir soal yang dilakukan melalui koreksi angket dan konsultasi dengan Pembimbing 1 dan Pembimbing II. Kemudian hasil uji coba angket menunjukkan bahwa variabel pengaruh kemajuan teknologi (X) dan variabel tingkat kematangan sosial siswa (Y) dinyatakan valid. Uji validitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mengukur variabel konstruk yaitu mencari korelasi antara masing- masing pertanyaan dengan skor total menggunakan rumus teknik korelasi *pearson product moment*, sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[N\sum x^2 - (\sum x)^2][\sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefesien korelasi *pearson* validitas

x = Skor tanggapan responden atas setiap pertanyaan

y = Skor tanggapan responden atas seluruh pertanyaan

n = Banyaknya jumlah/subjek responden

(Sujarweni, 2012)

Setelah mengetahui hasil dari rumus *pearson product moment*, kemudian peneliti juga melakukan pengujian kembali angket menggunakan uji dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05 dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu jika  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  maka instrumenn dinyatakan valid. Untuk memudahkan uji coba dalam penelitian ini maka dilakukan dengan menggunakan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Adapun kriteria diterima atau tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS (Prayitno, 2012).

Berdasarkan nilai korelasi :

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka item dinyatakan valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka item dinyatakan tidak valid.

Berdasarkan signifikansi :

- a. Jika nilai signifikansi  $> \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan tidak valid.
- b. Jika nilai signifikansi  $< \alpha$  (0,05) maka item dinyatakan valid.

## B. Uji Reliabilitas

Penentuan reliabilitas dalam penelitian ini, peneliti berpedoman pada teori menurut Arikunto (2010), reliabilitas menunjukkan pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Maka untuk membuktikan alat pengumpul data akan diadakan uji coba reliabilitas yang menunjukkan bahwa suatu alat ukur dikatakan reliabel apabila tes tersebut menunjukkan hasil-hasil yang tetap dan mantap. Untuk uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian.

Menurut Wibowo (2012) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik. Beberapa peneliti berpengalaman merekomendasikan dengan cara membandingkan nilai dengan tabel kriteria indeks koefisien pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Indeks Koefisien Reliabilitas

No.	Nilai Interval	Kriteria
1.	< 0,20	Sangat rendah
2.	0,20 – 0,399	Rendah
3.	0,40 – 0,599	Cukup rendah
4.	0,60 – 0,799	Tinggi
5.	0,80 – 1,00	Sangat tinggi

Sumber : Wibowo (2012)

Selain itu nilai reliabilitas dapat dicari dengan membandingkan nilai *cronbach's alpha* pada perhitungan SPSS dengan nilai  $r$  tabel menggunakan uji satu sisi pada taraf signifikansi 0,05 (SPSS secara default menggunakan nilai ini) dan  $df = N - k$ ,  $df = N - 2$ ,  $N$  adalah banyaknya sampel dan  $k$  adalah jumlah variabel yang diteliti, kriteria reliabilitasnya yaitu (Wibowo, 2012) :

- a. Jika  $r_{hitung}(r_{alpha}) > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut reliabel.
- b. Jika  $r_{hitung}(r_{alpha}) < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan/pernyataan tersebut tidak reliabel.

Adapun langkah-langkah analisis data untuk menguji reliabilitas dilakukan pada program SPSS adalah sebagai berikut :

- a. Menghitung jumlah skor jawaban responden tiap item pertanyaan/pernyataan, dalam hal ini skor total tidak diikuti sertakan.
- b. Melakukan analisis menggunakan perintah *analyze* kemudian *scale reliability analysis*.
- c. Membandingkan nilai *cronbach's alpha* dengan  $r_{tabel}$ .

### 3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif maka diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus interval, yaitu :

#### A. Teknik Distribusi Frekuensi

Analisis data frekuensi dilakukan terhadap hasil pengambilan data dari angket (pengaruh penerapan metode *E-voting*) dan angket (tingkat partisipasi masyarakat desa wonodadi). Analisis distribusi frekuensi dilakukan untuk mengetahui klasifikasi beserta presentase tingkat pengaruh penerapan *metode E-voting* terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi. Analisis distribusi frekuensi menggunakan rumus interval yang dikemukakan oleh Hadi (2001) dengan persamaan sebagai berikut :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = Kategori

Kemudian untuk mengetahui tingkat persentase digunakan rumus persentase yaitu sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Besarnya Presentase

F = Jumlah skor yang diperoleh diseluruh item

N = Jumlah perkalian seluruh item dengan responden

Setelah angka presentase didapat maka dimasukkan kedalam kriteria yang telah ditentukan menurut Arikunto (2019) yaitu sebagai berikut:

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = Kurang baik

0% - 39% = Tidak baik

## B. Uji Prasyarat Analisis

### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu percobaan untuk mengetahui apakah data sampel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan guna menguji apakah data penelitian yang digunakan terdistribusi dengan normal. Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 untuk memperoleh koefisien signifikasinya.

Uji yang dilakukan adalah uji *kolmogorov smirnor*. Dasar pengambilan keputusan hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a.) Jika nilai signifikasi (Sig) lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
- b.) Jika nilai signifikasi (Sig) lebih kecil dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal.

### 2. Uji Linier

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh penerapan metode *E-voting* (Variabel X) dan tingkat partisipasi masyarakat (Variabel Y) mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Menurut Prayitno (2008) menyatakan bahwa uji linieritas biasanya digunakan sebagai uji prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian pada SPSS 20 dengan menggunakan *Test For Liniarty* pada taraf sig 0,05 dan dua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan apabila signifikansi linier berkurang dari 0,05.

### 3. Uji Homogenitas

Uji homogenitas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah dua atau lebih variabel populasi adalah sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk prasyarat dalam analisis independent sample t0test dan anova. Untuk membuktikan hipotesis komparatif menggunakan dasar asumsi varian (anova) adalah varian dari populasi sama. Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 20 untuk memperoleh koefisien signifikasinya. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas adalah sebagai berikut:

- a.) Jika nilai Sig. > 0.05, maka dapat dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok data adalah sama.
- b.) Jika nilai Sig. < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa varian dua atau lebih kelompok data adalah tidak sama.

## C. Analisis Data

### 1. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya pengaruh positif yang signifikansi dari penerapan metode *E-voting* (X) sebagai variabel bebas terhadap tingkat partisipasi masyarakat (Y) sebagai variabel terikat. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana dan dilakukan menggunakan alat bantu SPSS 20. Guna mengetahui nilai signifikansi dari kemajuan penerapan metode *E-voting* (X) sebagai variabel bebas dengan partisipasi masyarakat (Y) sebagai variabel terikat maka dilakukan uji regresi linier sederhana menggunakan daftar analisis varian (anova) dengan ketentuan apabila  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  pada taraf 5% dengan dk pembilang (k-2) dan dk penyebut (n-k), maka regresi linier data hasil dari analisis regresi. Sehingga besarnya pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan. Adapun persamaan dari regresi linier adalah sebagai berikut:



$$\bar{Y} = a + b X$$

Keterangan:

Y : Subjek pada variabel independen. X : Prediktor.

a : Harga Y ketika harga X=0 (harga konstanta). b : Koefisien regresi.

(Sugiyono, 2019)

Dasar pengambilan keputusan hasil uji hipotesis adalah sebagaiberikut:

- 1.) Jika nilai signifikasi (Sig.) lebih kecil (<) dari probabilitas 0,05 maka ada pengaruh program wajib pramuka (X) terhadap pengembangan karakter kebangsaan (Y).
- 2.) Jika nilai signifikasi (Sig.) lebih besar (>) dari probabilitas 0,05 maka tidak ada pengaruh program wajib pramuka (X) terhadap pengembangan karakter kebangsaan (Y).

Dalam pengujian hipotesis pada penelitian, terdapat beberapa kriteria yang harus dilakukan diantaranya:

- 1.) Apabila nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dengan  $dk = n-2$  atau  $54-2$  dan  $\alpha 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya  $H_a$  diterima.
- 2.) Apabila probabilitas (Sig.)  $< 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan sebaliknya  $H_a$  ditolak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah peneliti lakukan mengenai Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dapat disimpulkan bahwasannya Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* positif terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Dalam indikator teknologi pada sistem *E-voting* menunjukkan hasil frekuensi data sebanyak 83 responden dengan presentase sebesar 89,2%. Hal ini dikarenakan masyarakat setuju bahwa metode *E-voting* sangat memudahkan pemilihan dengan menghemat waktu para pemilih hingga memudahkan pemilihan kepala desa tanpa melakukan kesalahan seperti salah mencoblos kertas yang memungkinkan surat suara tidak terbaca. Kemudian berdasarkan data pada indikator operasional prosedural hasil frekuensi data sebanyak 72 responden dengan presentase sebesar 77,4%. bahwa indikator operasional prosedural dalam kategori baik sesuai dengan penilaian responden yang rata-rata menjawab setuju dilihat dari instrumen tersebut, yaitu Penggunaan alat elektronik untuk melakukan akses *E-voting* mudah dilakukan, *E-voting* dapat mengakomodasi kebutuhan pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, dan Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa menggunakan *E-voting* mendapatkan bantuan jika terdapat gangguan akses internet. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan dari beberapa responden. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linier sederhana diperoleh thitung untuk variabel Pengaruh Penerapan Metode *E-voting*(X) sebesar 8.174 dengan  $dk = 93 - 2 = 91$  pada  $\alpha 0,05$  sebesar 1,990.

Jadi,  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $8,174 > 1,990$ . Dengan demikian bahwa hipotesis H0 ditolak dan hipotesis H1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya Pengaruh Penerapan Metode *E-voting* terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi, dan persentase besarnya pengaruh positif dari Penerapan Metode *E-voting* terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Wonodadi adalah sebesar 42,3% pada taraf signifikan 0,000. Hasil analisis ini membuktikan teori Qadah dan Taha dalam (Azizah, 2018) yang mengatakan tujuan dari penerapan e-voting adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat, mengurangi biaya dan meningkatkan validitas dan akurasi pemilu. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besar kekuatan pengaruh e-voting maka semakin besar pula partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala desa di desa wonodadi pada tahun 2022. Dan sisanya 57,7% dari faktor lain yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat kebanyakan mereka dari kalangan yang tidak relatif muda sehingga tidak mengikuti atau menggunakan hak pilih mereka karena ketidapkahaman akan metode *E-voting* itu sendiri, berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson yaitu pada tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tajam pula seseorang dalam menganalisa informasi tentang politik, kemudian pekerjaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam partisipasi politik karena para pemilih yang bekerja diluar lembaga yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah tidak terlalu memikirkan kehadiran mereka dalam pemilihan umum, desa wonodadi yang saat ini mata pencaharian di dominasi oleh petani sebanyak 879 jiwa, wiraswasta sebanyak 428 jiwa ,104 sebagai pekerja lainnya, dan 121 sebagai buruh.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka

saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Metode *E-voting* merupakan kebijakan yang baru, maka dari itu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat desa. Sosialisasi kebijakan *E-voting* dalam pemilihan kepala desa awalnya mendapat respon kurang baik dari warga setempat, dikarenakan masyarakat desa yang tidak memiliki keinginan untuk belajar lebih dan tidak mengerti teknologi. Agar masyarakat desa bisa mengetahui tentang penggunaan *E-voting* tersebut.

Dalam pelaksanaan *E-voting*, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi kualitas dalam teknis penggunaan elektronik tersebut sehingga bila ada gangguan jaringan dapat diatasi dengan waktu yang singkat sehingga tidak menimbulkan penumpukan pada pemilih di TPS dan membuat pemilih merasa tidak sabar hingga membuat mereka tidak jadi untuk melaksanakan pemilihan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Arikunto, S. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azizah, A. H. (2018). Analisis Faktor Kepercayaan Terhadap Teknologi Pada Keinginan Masyarakat Dalam Mengadopsi E-Voting. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 4(2), 109-115.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Bulqiyah, Hasanul, Sholeh Muadi, and dan George Towar Iqbal Tawakkal. 2019. Pemilihan Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus Di Pulau Bawean, Indonesia. *Jurnal Wacana Politik - ISSN 2502 - 9185 : E-ISSN: 2549-2969* Volume 4,: 68–80.
- Chika Nisa Amanda, Sri Wibawani. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politikmasyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Secara *E-voting* Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Public Administration Journal* Volume 1.
- Dihan, Priyono. 2010. *-E-voting: Urgensi Transparansi Dan Akuntabilitas*. *Seminar Nasional Informatika*, no. UPN Veteran Yogyakarta.
- Drehem, I. M., Djanali, S., & Pratomo, B. A. 2016. Implementasi Kontrol Integritas E-Kiosk Untuk Pengamanan Sistem Pemungutan Suara Secara Elektronik (*E-voting*).*Jurnal TEKNIK ITS*, 5(1), A14-A18.
- Elida IN Laily. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan

Partisipatif. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 3 (3).

Gusti ilham Husada, Dr.Hj. Budi Setiawati, Dra M.Si. 2021. Efektivitas Penerapan Sistem Elektronik Voting Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Tanta Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.  
[Http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id/Index.Php/JAPB](http://Jurnal.Stiatabalong.Ac.Id/Index.Php/JAPB) ISSN : 2723-0937 Volume 4 (Nomor 1).

Hasan, Shadili. 2005. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Ikhsan Darmawan, Dkk. 2014. *Memahami E-voting*. Jakarta: Buku Obor.

International IDEA. 2011. *Memperkenalkan Pemilihan Elektronik: Pertimbangan Esensial*. Australia:Program Asia dan Pasifik International IDEA.

Liando, Daud M. 2016. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Volume 3 N.

Lisdiana. 2013 .Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Berencana Pada Pukesmas Parit Haji Husein II Kecamatan Pontianak.Skripsi.Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik Universitas Tangjungpura

Mahardika, Satya. 2017. Implementasi Kebijakan Electronic Voting (*E-voting*) Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Boyolali Tahun 2013.||

Mariana, Dkk. 2008. *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mashuri, Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: polGov.

Miriam, Samuel P. Huntington dan Nelson dalam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Normina. 2014. Masyarakat dan sosialisasi. *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* Volume 12 No. 22 Oktober 2014

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prayitno Dkk. 2008. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta : PT. Renika Cipta.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 10.
- Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia WidiaSarana Indonesia.
- Sa'ban, L.M. Azhar, Anwar Sadar, and Nastia Nastia. 2019. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota BauBau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 4(1): 29. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1072>.
- Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subagyo, P. 2016. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung:Refika Aditama.
- Widjaja. HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat DanUtuh*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yalvema Miaz. 2012. *Partisipasi Politik Pola Prilaku Pemilih Pemilu Masa OrdeBaru dan Reformasi*. Padang: UNP Pres.
- Yuningsih, Neneng Yani, Valina Singk A Subekti. 2016. Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, Dan Modern Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *JurnalPolitik* 1, No. 2.
- Yusfar ilhaqul C, Dede Kurniadi. 2017. Rancang bangun electronic voting pemilihan

kepala daerah kabupaten garut. *Jurnal Algoritma Vol. 14 No. 2 2017*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pasal 1, 25-26)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 40 tentang  
Peraturan Pelaksanaan.



